

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih jauh dari karakteristik berkualitas sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor.71 Tahun 2010. Hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016. Perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Perkembangan Opini LKPD Tahun 2011 s.d. 2015

LKPD (TAHUN)	OPINI								
	WTP	PRESENTASE	WDP	PRESENTASE	TMP	PRESENTASE	TW	PRESENTASE	JML
2011	68	13%	351	67%	100	19%	5	1%	524
2012	120	23%	320	61%	79	15%	5	1%	524
2013	157	30%	309	59%	47	9%	11	2%	524
2014	253	47%	248	46%	33	6%	5	1%	539
2015	312	58%	187	35%	30	6%	4	1%	533

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Badan Pemeriksaan Keuangan Semester 1 Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas terlihat 312 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian atau hanya sekitar 58% dari total LKPD yang diperiksa oleh Badan

Pemeriksaan Keuangan (IHPS,2016). Fenomena ini menggambarkan 42% LKPD tidak mampu mencapai Wajar Tanpa Pengecualian, walaupun jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya tahun 2014 mengalami peningkatan namun tetap saja peningkatan tersebut masih jauh dari harapan.

Selain itu belum membaiknya kualitas laporan keuangan daerah juga terlihat dari temuan BPK selama melakukan pemeriksaan terhadap LKPD tahun 2014 antara lain sebagai berikut:

1. Dari total 542 pemerintah daerah yang wajib menyusun Laporan Keuangan, hanya 533 LKPD yang dapat memenuhi jadwal waktu penyerahan LKPD, (Buku II IHPS, 2016).
2. Temuan BPK terhadap penurunan opini atas 30 LKPD Tahun 2015 yaitu dari Wajar Tanpa Pengecualian menjadi Wajar Dengan Pengecualian pada 19 Pemda, dari Wajar Dengan Pengecualian menjadi Tidak Menyatakan Pendapat pada 8 Pemerintah Daerah, dari Wajar Dengan Pengecualian menjadi Tidak Wajar pada 2 Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah Tana Toraja dan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, dan dari Wajar Tanpa Pengecualian menjadi Tidak Wajar pada Pemerintah Kabupaten Barru setelah sebelumnya selama 2 tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (Buku II IHPS, 2016).
3. Hasil pemeriksaan mengungkapkan sebanyak 6.150 kasus temuan kelemahan SPI yang terdiri dari permasalahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern(Buku II IHPS, 2016).

4. Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi 6.016 permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial terdiri dari permasalahan yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp1,17 triliun, potensi kerugian daerah sebesar Rp538,88 miliar, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp 809,01 miliar. Selain itu terdapat permasalahan ketidakpatuhan yang tidak berdampak finansial berupa penyimpangan administrasi (Buku II IHPS, 2016).
5. administrasi Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukan adanya penyimpangan sebanyak 2.369 kasus pada 510 pemerintah daerah (Buku II IHPS, 2016).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya yakni antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Mahsun dan Sulistiyowati, 2012).

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas faktor yang harus menjadi dasar pertimbangan adalah kualitas sumber daya manusia, penerapan teknologi sistem informasi dan komitmen organisasi. Namun pada kenyataannya ketiga faktor tersebut masih memiliki masalah.

Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006 dalam Modo dkk, 2016). Sehingga untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting (Modo dkk, 2016).

Hal lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi sudah menjadi pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi suatu organisasi yang tangguh dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif ditengah persaingan yang semakin ketat ini. Dengan kemajuan teknologi pada saat sekarang, instansi-instansi pemerintah sudah mulai meninggalkan sistem manual, beralih ke sistem komputer. Namun yang menjadi kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala

ini yang mungkin menjadi faktor penggunaan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal (Modo dkk, 2016).

Hal lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah komitmen organisasi. Komitmen dari Pemerintah Daerah dalam hal ini merupakan keinginan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan perubahan sesuai dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang reliable sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hal tersebut akan berdampak pada semakin baiknya kualitas dari informasi laporan keuangan. Pernyataan ini mendukung hasil penelitian Suwanda (2015), yaitu komitmen organisasi secara signifikan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Modo dkk, 2016).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di Kabupaten Ponorogo (Setyawan, 2015).

Dalam sebuah penelitian yang berjudul pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi

keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Empat Lawang (Andini dan Yusrawati, 2015).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo (Sataruno dkk, 2014).

Penelitian dalam skripsi yang berjudul pengaruh kualitas sumber daya manusia dan penerapan teknologi sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa Kualitas sumber daya manusia dan penerapan teknologi sistem informasi manajemen keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Mohamad dkk, 2014).

Hasil penelitian menyatakan bahwa Kompetensi Pegawai dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Triantoro dan Wiganda, 2014)

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka dapat diajukan sebuah penelitian dengan judul **"Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah"**(Studi Pada SKPD di Kabupaten Ponorogo).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- b. Bagaimana pengaruh Penerapan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- c. Bagaimana pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- d. Bagaimana pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara bersama-sama?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

- c. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara bersama-sama.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi berperilaku dan akuntansi sektor publik, khususnya untuk memahami hubungan antara Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dan Komitmen Organisasi dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- b. Bagi Organisasi Sektor Publik atau Pihak yang Terkait

Sebagai bahan Evaluasi mengenai kualitas Informasi laporan keuangan yang dihasilkan dari kualitas sumber daya manusia, penerapan teknologi sistem informasi manajemendaerah (SIMDA) keuangan dan Komitmen Organisasi.

c. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan dan dapat mengetahui serta mempelajari masalah-masalah yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia, penerapan teknologi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan dan komitmen organisasi dalam hubungannya dengan Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

d. Bagi Peneliti Yang Akan datang

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan mengenai penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dan bisa dijadikan referensi untuk penelitian yang akan datang.